



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL
NOMOR: 010/IIBN.R/SK/VIII/2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
DAN PERUDUNGAN (*BULLYING*) BAGI CIVITAS AKADEMIKA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual dan perudungan (bullying) dilingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, perlu dilakukan perbaikan atas pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dan perudungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) bagi Civitas Akademik;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Perkerti;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Raya Batam Center Blok B No 26 – 28
No Telp : 0778 4170 719, Whatsapp : 0811 7700 899

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
11. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*) BAGI CIVITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

Kesatu : Menetapkan Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dan Perundungan (*Bullying*) Bagi Civitas Akademik Institut Teknologi Dan Bisnis Indobaru Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan rektor ini, untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Kedua : Dengan Ditetapkannya Keputusan Rektor Ini, Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional Nomor 010/IIBN.R/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dan Perundungan (*Bullying*) Bagi Civitas Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, dilaksanakan dan dipatuhi semua pihak.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Raya Batam Center Blok B No 26 - 28

No Telp : 0778 4170 719, Whatsapp : 0811 7700 899

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis

Indobaru Nasional,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN
SEKSUAL DAN PERUDUNGAN (BULLYING) BAGI CIVITAS AKADEMIKA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**



**BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Sasaran.....	2
E. Ruang Lingkup.....	2
F. Pengertian.....	3
BAB II BENTUK- BENTUK KEKERASAN SEKSUAL, PELECAHAN SEKSUAL, DAN PERUNDUNGAN.....	4
A. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual.....	4
B. Bentuk- Bentuk Pelecehan Seksual.....	5
C. Bentuk- Bentuk Perundungan.....	5
BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN.....	7
A. Prinsip Pencegahan.....	7
B. Strategi Pencegahan.....	7
BAB IV PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN.....	10
A. Prinsip Penanggulangan.....	10
B. Mekanisme Penanggulangan.....	10
BAB V PENUTUP.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan mengenai prinsip kesetaraan kesepakatan untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak untuk hidup tanpa rasa takut dari kekerasan dan pelecehan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 281 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sejalan dengan kedua ayat tersebut, kehidupan kampus yang baik harus memberikan rasa nyaman, aman, dan kondusif dalam pengembangan karakter mahasiswa.

Salah satu kondisi yang dianggap memberikan ancaman terhadap rasa nyaman, aman, dan kondusif yaitu terjadinya kekerasan/pelecehan seksual dan perundungan (*bullying*). Kekerasan/pelecehan seksual dan perundungan (selanjutnya disingkat KPSP) dapat terjadi pada siapa pun dan di mana pun termasuk di lingkungan kampus. Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN) berkomitmen untuk memberikan lingkungan kampus yang sehat, aman, nyaman, dan kondusif bagi sivitas akademika. Atas dasar tersebut, Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi seluruh sivitas akademika dari tindakan KPSP.

Mengingat hal tersebut di atas, Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional perlu menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Sivitas Akademika (IIBN). Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pencegahan, penanggulangan, dan penanganan KPSP di lingkungan IIBN.

B. Tujuan

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan seksual dan perundungan bagi Sivitas Akademika IIBN diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk mencegah serta menangani secara efektif KPSP. Selanjutnya, pedoman tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian dan sarana *edukasi* (*raising awareness and education*) dalam pencegahan KPSP di lingkungan kampus agar tidak terjadi reviktimisasi atau tindakan penghakiman pada korban serta mencegah keberulangan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dan perundungan bagi Sivitas Akademik IIBN meliputi:

1. Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
2. Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
3. Tenaga Kependidikan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
4. Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dan perundungan bagi Sivitas Akademik IIBN meliputi:

1. Pencegahan Kekerasan/ Pelecehan Seksual
2. Penanganan Kekerasan/ Pelecehan Seksual
3. Pencegahan Perundungan
4. Penanganan

F. Pengertian

Untuk memahami lebih lanjut tentang kekerasan / Pelecehan seksual, perundungan, serta pencegahan dan penanganannya, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa pengertian berikut:

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat, seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang, itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, yaitu tindakan seksual berupa sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas. Tindakan yang dimaksud meliputi siulan, main mata, ucapan bemuansa seksual, inepertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, serta gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan inungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
3. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun social di dunia nyata atau dunia maya. Tindakan perundungan meliputi penghinaan, cacian, cemoohan, fitnah , makin olok-olok, dan kekerasan fisik terhadap korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan kesehatan.

BAB II

BENTUK- BENTUK KEKERASAN SEKSUAL, PELECAHAN SEKSUAL, DAN PERUNDUNGAN

A. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk. Secara umum, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yaitu:

1. **Pemerksaan** adalah suatu tindakan criminal berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
2. **Pelecehan Seksual** (dijelaskan pada bagian tersendiri)
3. **Eksplorasi seksual** adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
4. **Intimidasi seksual** adalah ancaman atau percobaan perkosaan, termasuk tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban, disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
5. **Protitulasi paksa** adalah protitulasi atau perbudakan seksual yang terjadi akibat pemaksaan oleh pihak ketiga. Tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap seseorang karena melanggar hak gerak korban melalui paksaan dan eksploitasi komersial.
6. **Pemaksaan aborsi** adalah tindakan menggugurkan janin kandungan sebelum sempurna bentuknya secara terpaksa yang mengakibatkan rasa tertekan dan dampak fisik dalam diri korban.
7. **Pemaksaan perkawinan** adalah sebuah pernikahan di mana salah satu pihak atau lebih dinikahi tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kehendaknya.
8. **Perdagangan perempuan** adalah segala tindakan pelaku human trafficking terhadap perempuan yang melibatkan salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan, antardaerah dan antarnegara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan sementara atau di tempat tujuan. Perdagangan

perempuan dilakukan dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain) dengan memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan.

9. **Kontrol seksual** adalah berbagai tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksa perempuan agar menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi citra “perempuan baik-baik”.
10. **Penghakiman bernuansa seksual** adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesunkitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam bentuk penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat Manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesdusilaan.

B. Bentuk- Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Secara umum, terdapat lima bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1. **Pelecehan fisik** termasuk sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu.
2. **Pelecehan lisan** termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar bernuansa seksual.
3. **Pelecehan isyarat** termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernuansa seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
4. **Pelecehan tertulis** atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, atau poster seksual, pelecehan melalui *e-mail*, dan moda komunikasi elektronik lainnya.
5. **Pelecehan psikologis/emosional** terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan,

C. Bentuk-Bentuk Perundungan

Terdapat berbagai bentuk perundungan. Secara umum, terdapat lima bentuk perundungan, yaitu:

1. Kontak Fisik Langsung

Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang

dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.

2. Kontak Verbal Langsung

Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip

3. Perilaku Nonverbal Langsung

Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam yang biasanya disertai dengan perundungan fisik atau verbal.

4. Perilaku Nonverbal Tidak Langsung

Tindakan mendiamkan seseorang dan/atau memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, sampai mengirimkan surat kaleng

5. *Cyber Bullying*

Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti menyebarkan rekaman video intimidasi dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

A. Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan ini sendiri sehingga pencegahan kekerasan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional menjadi terstruktur, sistematis, dan terealisasi tepat dengan sarannya. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1 Memegang Prinsip Keadilan

Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.

2 Tidak Diskriminatif

Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dan perundungan yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan, dan keberadaan pelaku.

3. Terintegrasi Fisik dan Nonfisik

Pencegahan terhadap kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan IIBN harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.

4. Melibatkan Semua Pihak

Pencegahan kekerasan di IIBN harus melibatkan semua individu di dalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, pihak ketiga yang bekerja sama, maupun masyarakat di lingkungan sekitar IIBN.

B. Strategi Pencegahan

Upaya pencegahan KPSP dilakukan melalui dua strategi, yaitu (1) penguatan kesadaran dan kepedulian, serta (2) penguatan kelembagaan dan penyiapan sarana

1. Penguatan Kesadaran dan Kepedulian

Penguatan kesadaran dan kepedulian merupakan upaya untuk menanamkan serta menguatkan pemahaman tentang konsep KPSP, langkah-langkah pencegahan, dan

penanggulangannya. Strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan berikut:

a. Pengintegrasian Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Gender dalam Kurikulum

Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dilakukan dalam perkuliahan mata kuliah umum (MKU) khususnya Pendidikan Agama, Ilmu Budaya Dasar, Pancasila, dan mata kuliah yang relevan.

b. Penyelenggaraan Pelatihan dan Kajian

Pencegahan KPSP dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan akademik berupa penyuluhan, diskusi terpumpun, seminar, kajian-kajian keagamaan, pembekalan PKM/PKL/KKL, pembinaan pegawai/karyawan, serta pelatihan.

c. Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan KPSP

Edukasi pencegahan dan penanggulangan KPSP diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, yaitu:

- Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
- Pendidikan karakter
- Pelatihan kepemimpinan mahasiswa
- Orientasi anggota baru organisasi kemahasiswaan
- Pembentukan *peer group*

d. Informasi dan Sosialisasi

Untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa tentang KPSP, Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional memaksimalkan pemanfaatan media komunikasi dan informasi, sebagai berikut;

- Daring: melalui *website*, radio kampus, televisi kampus, dan media sosial
- Luring: melalui media cetak seperti buletin, iklan, *banner*, dan flyer

2. Penguatan Kelembagaan dan Penyiapan Saranan Pendukung

Penguatan kelembagaan dan penyiapan sarana pendukung merupakan upaya untuk menyiapkan kebijakan, program, dan infrastruktur terkait pencegahan serta penanggulangan KPSP. Strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan berikut:

a. Penelitian dan Pemetaan

Melaksanakan penelitian dan pemetaan terhadap kondisi serta potensi kekerasan di kampus sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dan program.

b. Penguatan UPT LBK

Memperluas mandat dan wewenang Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling (UPT LBK) sehingga dapat melaksanakan layanan pengaduan dan pendampingan korban serta layanan hukum, di samping menjalankan layanan

utamanya, yaitu memberikan konseling, tes psikologi, dan pengembangan karir.

c. Penyiapan Sarana

Mengadakan sarana yang dapat meminimalisasi terjadinya KPSP berupa pemasangan CCTV, penerangan/ pencahayaan yang maksimal, dan sarana lain yang dibutuhkan.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

A. Prinsip Penanggulangan

Setiap tahap dalam penyelesaian KPSP di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional harus memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan informasi dari kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Keadilan dan keseimbangan informasi ini meliputi:

1. Para pihak diberikan pemberitahuan mengenai keluhan atau tuduhan terhadap mereka dan prosedur penyelesaian persoalan tersebut.
2. Para pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar dan memberikan tanggapan mengenai keluhan atau tuduhan.
3. Pengambil keputusan harus bertindak dengan jujur, tidak memihak, dan tidak bias.

B. Mekanisme Penanggulangan

1. Prosedur Pengaduan

a. Pengaduan Langsung

- 1) Korban datang dan diterima oleh pihak berwenang sebagaimana diatur dalam kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk melakukan identifikasi kasus.
- 2) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah, atau pingsan, identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut.
- 3) dalam kondisi gawat.
- 4) Identifikasi dilakukan petugas dengan pengisian daftar cek (*checklist*) dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban).
- 5) Petugas melakukan koordinasi dengan instansi pemberilayanan dalam kampus dan melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.
- 6) Membuat surat rujukan dan menyiapkan dokumen rujukan.

b. Pengaduan Tidak Langsung

- 1) Pengaduan dilakukan melalui perantara orang lain baik itu teman, keluarga, maupun orang lain melalui media seperti telepon, pesan singkat (SMS), obrolan *WhatsApp*, surat elektronik, dan/atau media sosial lainnya.

- 2) Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- 3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi).
- 4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan daftar cek (*checklist*) sesuai dengan persetujuan korban.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi pemberi layanan dalam kampus dan melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.
- 6) Membuat surat rujukan dan menyiapkan dokumen rujukan.
- 7) Mendokumentasikan kasus.

2. Tata Cara Penyelesaian Pengaduan

Pelapor harus diberi kesempatan untuk memilih menyelesaikan kasus aduannya melalui tata cara informal dan/atau formal. Kedua tata cara tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) Tata Cara Informal

Prosedur penyelesaian pengaduan melalui tata cara informal menekankan pada pemecahan, kerahasiaan dan mediasi, serta menghindari sanksi dan ganti rugi. Prosedur informal harus selesai dalam kurun waktu 30 hari kerja “secara kekeluargaan”. Cara-cara informal dalam menangani pelecehan seksual tersebut termasuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Pelapor diberi kesempatan menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatannya tidak diinginkan.
- 2) Pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada orang yang dapat menyimpan rahasia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti teman, dosen pegawai, atau pejabat yang berwenang untuk menangani kasus-kasus KPSP.
- 3) Pelapor dapat meminta teman, dosen, pegawai, atau pejabat yang berwenang secara pribadi untuk secara informal berbicara dan melakukan pendekatan kepada pelaku.
- 4) Saluran komunikasi yang dapat digunakan oleh pelapor untuk membahas kasusnya tidak harus mengemukakan identitas. Petugas yang menerima laporan aduan harus profesional dalam menangani laporan tersebut.

2) Tata Cara Formal

Dalam prosedur penyelesaian pengaduan melalui tata cara formal, pelapor tidak harus menunggu keputusan dari upaya informal yang ditempuh sebelum memilih penyelesaian secara formal. Pelapor perlu memastikan bahwa tata cara formal untuk

menyelesaikan keluhan kesah sudah diberlakukan dan dikomunikasikan kepada semua pihak. Dengan prinsip menjaga keadilan, tata cara formal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Percakapan dalam keluhan kesah bersifat pribadi dan keluhan-keluhan tersebut tetap direkam secara tertulis.
- b) Penyampaian keluhan secara terperinci kepada terduga pelaku.
- c) Pemberian kesempatan kepada terduga pelaku untuk menjawab dan membela diri terhadap sangkaan tersebut.
- d) Bila ada ketidaksepakatan tentang fakta-fakta, penyidikan dilaksanakan untuk mencatat keterangan dari para saksi.
- e) Temuan dalam keluhan kesah disusun dengan didukung bukti-bukti.
- f) Membuat laporan tertulis tentang proses penyidikan, bukti-bukti, temuan-temuan, dan usul penyelesaian untuk disampaikan kepada pihak berwenang di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
- g) Pihak berwenang di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional melaksanakan penyelesaian yang diusulkan atau memutuskan tindakan terhadap terlapor sesuai dengan kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan/Pelecehan Seksual dan Perundungan ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformatif yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional. Pedoman ini diharapkan dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang nyaman, aman, dan kondusif dalam pengembangan karakter mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Pedoman ini dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang beretika dan berakhlak terpuji.